

**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

Raissa Aidintya Sembiring

Ch. Heni Kurniawan

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta

A. Latar Belakang Masalah

Krisis multi dimensional yang terjadi pada tahun 1998 yang mengancam integritas bangsa mengakibatkan lemahnya keamanan dan ketertiban umum serta ketidakpastian hukum. Pada masa itu pemerintah pusat sulit untuk mengawasi masalah multi aspek yang terjadi di daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya termasuk segala potensi sumber daya yang ada di wilayahnya.

Selain itu, krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda bangsa Indonesia memberikan dampak positif dan negatif berupa upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penetapan Undang-Undang No.33 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 oleh pemerintah, mengenai Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada Pemerintah Daerah (Halim, 2007). Selanjutnya Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah.

Disempurnakannya Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan. Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2004), yang mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik.

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada organisasi privat atau swasta, anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan instansi pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009:12) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu: (1) alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilai kinerja, (7) alat motivasi dan (8) alat menciptakan ruang publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja

yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Reformasi anggaran dengan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan APBD untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya *output* optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien dan efektif dalam pelaksanaannya dan tercapainya suatu hasil (*outcome*).

Menurut LAN Tahun 2008 Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penerapan anggaran berbasis kinerja dapat diukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Agar terciptanya akuntabilitas dalam penerapan anggaran tersebut maka diperlukannya penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui 4 (empat) tahapan proses yaitu:

1. Perencanaan Anggaran
2. Pelaksanaan Anggaran
3. Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran
4. Evaluasi Kinerja

Dengan adanya penerapan anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pada instansi pemerintah daerah, karena semakin baik perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja maka akuntabilitas kinerja yang dilakukan pemerintah semakin efektif.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan anggaran dilakukan oleh Haspiarti (2012). Penelitian tersebut membuktikan bahwa penerapan anggaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/ pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pare-Pare .

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sefriyana (2014). Penelitian tersebut menguji penerapan anggaran yang terdiri dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja yang membuktikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Bengkulu.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Muda (2005) yang menguji tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja yang menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan.

Tahun 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 10 Kabupaten/Kota dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang belum mendapatkan opini tersebut karena BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini terkait dengan

akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang yang merupakan cerminan dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.

Penelitian diatas mengevaluasi karakteristik yang berbeda-beda sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan di Indonesia. Hal ini memotivasi dilakukannya penelitian ulang dengan menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dengan objek yang berbeda yaitu Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang. Alasan dipilihnya Kabupaten Magelang adalah opini WDP atas LKPD Kabupaten Magelang. Selain itu penelitian serupa juga belum pernah dilakukan di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang?
2. Apakah Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang?
3. Apakah Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang?
4. Apakah Evaluasi Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang?
5. Apakah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dengan objek penelitian yang berbeda yaitu SKPD Kabupaten Magelang.

D. Hipotesis

1. Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja yang terukur melalui prinsip-prinsip akuntabilitas publik dalam pengelolaan daerah bahwa harus transparasi, akuntabilitas dan value for money, dapat dijelaskan oleh Mardiasmo (2004:105) bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Winardi (2007) dalam Sefriyana (2014) menyatakan perencanaan meliputi memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi masa datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) membuktikan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini juga

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Muda (2005) dan Nurhayati (2014) yang membuktikan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ha₁ : Perencanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

2. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan pemerintah berpegang pada anggaran yang ditetapkan, sehingga tercapainya anggaran berarti tercapainya juga tercapainya sasaran pemerintah. Oleh karena itu, anggaran seharusnya mempunyai kualitas yang baik dan realistis, dengan adanya pengendalian keuangan yang efektif, pelaksanaan anggaran dapat lebih baik sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dan Sefryana (2014) membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Muda (2005) dan Nurhayati (2014) yang membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ha₂ : Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Deputy IV BPKP (2005:16) menyatakan bahwa: akhir tahun anggaran setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan, manajemen membuat laporan kinerja meliputi laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan laporan kinerja non-keuangan untuk dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan ditahun berikutnya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas dana yang digunakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012), Sefryana (2014), Nurhayanti (2014) dan Muda (2005) membuktikan bahwa pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

Ha₃ : Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

4. Pengaruh Evaluasi Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan Modul Akuntabilitas Instansi (2007), tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang, sehingga dengan adanya evaluasi kinerja yang dilakukan dengan baik diharapkan akan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012), Sefryana (2014), Nurhayanti (2014) dan Muda (2005) membuktikan bahwa evaluasi kinerja anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ha₄ : Evaluasi Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

5. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menurut Halim (2007: 177) menjelaskan bahwa elemen-elemen yang penting harus ditetapkan terlebih dahulu dalam anggaran berbasis kinerja adalah:

- a. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.
- b. Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi .
- c. Pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dan prestasinya.
- d. Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat digunakan dalam manajemen perencanaan, pemograman, penganggaran dan evaluasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Haspiarti (2012) dan Muda (2005) membuktikan bahwa variabel-variabel dari penerapan anggaran yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Ha₅ : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah SKPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Magelang.

2. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Aparat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

3. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah para kepala SKPD , Sekretaris pada SKPD, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*. Pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu (Jogiyanto, 2010). Sampel dalam penelitian ini adalah para kepala SKPD , Sekretaris pada SKPD, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian. Adapun kriteria yang digunakan adalah para Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Magelang. Sedangkan yang tidak termasuk dalam Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan kriteria telah menduduki jabatan struktural tertentu minimal selama 2 (dua) tahun.

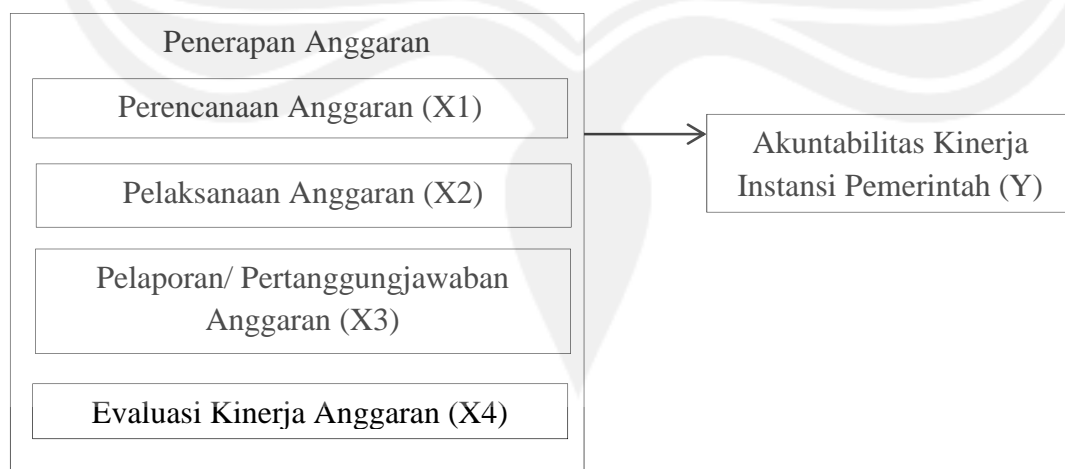
5. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen penelitian ini adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja. Sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

6. Model Penelitian

Model penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1



7. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan ialah data primer, yang berupa persepsi para responden terhadap variabel-variabel yang digunakan. Modus komunikasi untuk memperoleh data dari responden dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner. Kuisisioner yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang akan dibagikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Setiap kuisisioner yang didistribusikan kepada para responden disertai surat permohonan pengisian kuisisioner.

F. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari penyebaran kuisisioner para kepala SKPD, Sekretaris pada SKPD, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian. Kriteria yang digunakan adalah para Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Magelang. Sedangkan yang tidak termasuk dalam Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan kriteria telah menduduki jabatan struktural tertentu minimal selama 2 (dua) tahun. Peneliti menetapkan rencana pembagian kuisisioner sebanyak 132 kuisisioner. Namun pada realitanya, yang diterima oleh instansi-instansi hanya 100 kuisisioner. Jumlah yang dapat digunakan untuk penelitian ini adalah 79 kuisisioner sedangkan 21 kuisisioner lainnya tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Tabel 1

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Kuisisioner			
		Rencana Penyebaran Kuisisioner	Dibagikan	Dikembalikan	Tidak Dikembalikan
1.	Bagian Tata Pemerintahan	4	3	2	1
2.	Bagian Organisasi	4	3	2	1
3.	Bagian Hukum	4	3	2	1
4.	Bagian Perekonomian	4	4	3	1
5.	Bagian Administrasi Pembangunan Daerah	4	4	3	1
6.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	4	3	3	0
7.	Bagian Humas dan Protokol	4	4	3	1
8.	Bagian Umum	4	3	3	0
9.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4	3	3	0
10.	Dinas Kesehatan	4	3	3	0
11.	Dinas Pertanian Pangan dan Kehutanan	4	2	1	1
12.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4	3	3	0
13.	Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi	4	4	2	2

14.	Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM	4	3	3	0
15.	Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	4	3	2	1
16.	Dinas Perdagangan dan Pasar	4	3	3	0
17.	Dinas Perhubungan	4	3	3	0
18.	Dinas Perternakan dan Perikanan	4	3	2	1
19.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	4	2	2
20.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)	4	5	4	1
21.	Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)	4	3	2	1
22.	Inspektorat	4	3	2	1
23.	Badan Perencana Pembangunan Daerah	4	4	4	0
24.	Badan Kepegawaian Daerah	4	3	2	1
25.	Kantor Kesbangpol	4	3	2	1
26.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	4	3	2	1
27.	Kantor Perpustakaan dan Arsip	4	3	1	2
28.	RSUD Muntilan	4	0	0	0
29.	Satpol PP	4	2	2	0
30.	Sekretariat DPRD	4	3	3	0
31.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPPT)	4	3	3	0
32.	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP)	4	2	2	0
33.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)		2	2	
Total		132	100	79	21

1. Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk mengetahui deskriptif jawaban responden terhadap variabel dalam penelitian ini. Analisis ini akan dibahas mengenai nilai rata-rata hitung (*mean*), standar deviasi, jawaban minimum dan maksimum jawaban responden. Hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
					Statistic	Std. Error	
Perencanaan	79	4	1	5	4.2392	.06821	.60625
Pelaksanaan	79	4	1	5	4.2785	.07390	.65683
Pelaporan	79	4	1	5	4.2954	.07428	.66020
Evaluasi	79	4	1	5	3.9662	.07121	.63289
Akuntabilitas	79	4	1	5	4.0987	.05557	.49394
Valid N (listwise)	79						

Dari kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dimana menggunakan skala Likert 1 – 5 (Sangat Tidak Setuju – Sangat Setuju). Peneliti akan membuat interval kelas menjadi tiga kategori yakni rendah, sedang/cukup tinggi dan tinggi dengan rumus : $\frac{n-1}{3}$, dimana n = bobot nilai tertinggi. Selisih interval kelas yang digunakan adalah 1,33. Sehingga interval kelas dapat dikelompokkan menjadi :

- a. 1,00 – 2,33 : rendah
- b. 2,34 – 3,66 : sedang/cukup tinggi
- c. 3,67 – 5,00 : tinggi

2. Pengujian Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji apakah tiap-tiap butir benar-benar telah mengungkapkan faktor atau indikator yang ingin diselidiki. Hasil uji validitas yang diuji menyatakan tiap butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini valid.

b. Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 maka semua butir pertanyaan/pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

3. Uji Normalitas

Uji Normalitas untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen, independen atau keduanya mempunyai sifat distribusi normal ataukah tidak. Dengan menggunakan uji statistik yang terdapat dalam uji hipotesis yaitu *Kolmogorof Smirnov* dapat diketahui apakah distribusi data normal atau mendekati normal. Berdasarkan uji normalitas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi keseluruhan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,055 maka dapat disimpulkan bahwas semua data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4. Uji Asumsi

Tabel 4

No.	Uji	Hasil Pengujian	Keterangan
1.	Uji Multikolinearitas	Nilai VIF (<i>Variance Inflation Factor</i>) semua variabel kurang dari 10 dan nilai <i>Tolerance</i> semua variabel lebih dari 0,1.	Tidak terjadi multikolinearitas
2.	Uji Heteroskedastisitas	Nilai probabilitas semua variabel lebih dari 0,10.	Tidak terjadi heteroskedastisitas.

5. Uji Hipotesis

Tabel 5

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	8.757	2.146		4.081	0.000
PERENCANAAN (X1)	0.055	0.094	0.067	0.583	0.562
PELAKSANAAN (X2)	0.346	0.308	0.138	1.122	0.265
PELAPORAN/ PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN (X3)	1.050	0.278	0.421	3.776	0.000
EVALUASI KINERJA (X4)	1.004	0.194	0.386	5.175	0.000
Y : AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH					
	R	: 0.873			
	R ²	: 0.716			
	AdjustedR ²	: 0.748			
	F-Hitung	: 59.024			
	Sig F	: 0.000			

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat dibuat suatu model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 8,757 + 0,055 X_1 + 0,346 X_2 + 1,050 X_3 + 1,004 X_4$$

Keterangan :

Y = Kinerja

X₁ = Perencanaan Anggaran

X₂ = Pelaksanaan Anggaran

X₃ = Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran

X₄ = Evaluasi Kinerja

1. Pengujian Nilai t

Pengujian hipotesis secara parsial dapat dilakukan dengan uji nilai t, yaitu menguji pengaruh parsial antara variabel independen dengan variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

a. Perencanaan Anggaran

Hasil analisis regresi pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai koefisien perencanaan anggaran adalah 0,055 dan nilai probabilitasnya adalah 0,562 dengan tingkat signifikansinya 10% ($\alpha = 0,1$). Hipotesis diterima jika nilai probabilitas $< 0,1$. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai probabilitas $0,562 > 0,1$ maka dapat disimpulkan perencanaan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Magelang.

b. Pelaksanaan Anggaran

Hasil analisis regresi pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai koefisien pelaksanaan anggaran adalah 0,346 dan nilai probabilitasnya adalah 0,265 dengan tingkat signifikansinya 10% ($\alpha = 0,1$). Hipotesis diterima jika nilai probabilitas $< 0,1$. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai probabilitas $0,265 > 0,1$ maka dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Magelang.

c. Pelaporan/ Pertanggungjawaban Anggaran

Hasil analisis regresi pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai koefisien pelaporan/pertanggungjawaban anggaran adalah 1,050 dan nilai probabilitasnya adalah 0,000 dengan tingkat signifikansinya 10% ($\alpha = 0,1$). Hipotesis diterima jika nilai probabilitas $< 0,1$. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai probabilitas $0,000 < 0,1$ maka dapat disimpulkan pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Magelang.

d. Evaluasi Anggaran

Hasil analisis regresi pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai koefisien evaluasi kinerja adalah 1,004 dan nilai probabilitasnya adalah 0,000 dengan tingkat signifikansinya 10% ($\alpha = 0,1$). Hipotesis diterima jika nilai probabilitas $< 0,1$. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai probabilitas $0,000 < 0,1$ maka dapat disimpulkan evaluasi kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kabupaten Magelang.

2. Pengujian F (*Goodness of Fit*)

Pengujian nilai F dilakukan untuk mengetahui kelayakan model (model fit). Persamaan regresi memenuhi *goodness of fit* jika $F_{hitung} > F_{tabel}$. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.13 diperoleh nilai F_{hitung} 59,024 dan nilai probabilitas sebesar 0,000.

Dengan taraf signifikansi $\alpha : 0,1$ dan derajat bebas (db : $n - 1 - k$) ($79 - 1 - 4$) = 74) diperoleh nilai F tabel sebesar 2,018. Nilai Fhitung (59,024) > Ftabel sebesar (2,018) dan nilai probabilitas < 0,10 menunjukkan bahwa model regresi memenuhi *goodness of fit* yang artinya bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Koefisien Determinasi

Nilai *adjusted R²* adalah 0.748. Nilai *adjusted R²* sebesar 0.748 mempunyai arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 74,8%. Dengan kata lain penerapan anggaran berbasis kinerja (perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja) mampu mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Magelang sebesar 74,8% sedangkan sisanya 25,2% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

G. Kesimpulan

1. Perencanaan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
3. Pelaporan/ Pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
4. Evaluasi Kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
5. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

H. Keterbatasan Penelitian

1. Dari 100 kuesioner yang disebar ke dalam 33 SKPD Kabupaten Magelang, 21 diantaranya tidak/belum dikembalikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kesibukan responden dan beberapa responden tidak bertemu secara langsung dengan peneliti.
2. Identitas reponden tidak terisi secara lengkap sehingga menyulitkan peneliti untuk mengetahui karakteristik responden yang terlibat dalam pengisian kuesioner.
3. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi jawaban melalui kuesioner yang diberikan sehingga kadang timbul perbedaan interpretasi atas maksud dan tujuan pernyataan.
4. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, penelitian ini hanya meneliti pada SKPD sehingga hasilnya hanya mencerminkan kondisi yang ada pada SKPD tersebut dan tidak dapat digeneralisasi pada semua keadaan.

I. Saran

Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap dengan cara mendatangi langsung responden dalam proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner serta melakukan wawancara secara langsung dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya. Responden juga diingatkan agar mengisi identitas responden secara lengkap sehingga tidak menyulitkan peneliti untuk mengolah data presentase responden. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bisa mengambil sampel yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPKP, D. I. (2005). *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. Jakarta: BPKP.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPPN, Yogyakarta.
- Haspiarti. (2012). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pare-Pare*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Jogiyanto, Hartono. M. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Muda, Taufik Djundjung. (2005). *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan*. Universitas Padjajaran, Jawa Barat.
- Nurhayanti, Ida. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Probolinggo*. Universitas Jember, Jawa Timur.
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP .2007. *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Revisi)*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Pusdiklatwas BPKP.2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi 5. Jakarta.
- Sefryana, Melfariza. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu*. Universitas Bengkulu.
- Sulisiana, Maria. N. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia, Jawa Barat.

Susilowati, Harini. (2014). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Motivasi Kerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Syambudi. (2012). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon*. Universitas Pasundan, Jawa Barat.

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

